BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional berawal dari kontak dan interaksi negara-negara di dunia, terutama dalam masalah politik. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, isu-isu internasional mengalami perkembangan. Negara ataupun aktor non-negara mulai menunjukkan ketertarikannya akan isu-isu internasional di luar isu politik, seperti isu ekonomi, lingkungan hidup, sosial, dan kebudayaan.

Hubungan internasional berkaitan erat dengan segala bentuk hubungan di antara masyarakat negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negara. Hubungan internasional sendiri merupakan segala macam hubungan antar bangsa dan kelompok bangsa dalam masyarakat dunia, serta kekuatan-kekuatan, tekanan-tekanan, proses-proses yang menentukan cara bertindak, dan cara berpikir manusia.

Hubungan internasional bersifat sangat kompleks serta interdisipliner, karena di dalamnya terdapat bermacam-macam bangsa yang memiliki kedaulatan masing-masing. Sehingga memerlukan mekanisme yang lebih menyeluruh dan rumit daripada hubungan antar kelompok manusia di dalam suatu negara. Namun, pada dasarnya, tujuan utama studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara dan non-negara. Perilaku

tersebut bisa berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional dan sebagainya.

Hubungan internasional adalah kunci utama negara atau dasar-dasar negara sebagai dari salah satu bagian dari interaksi negara-negara dalam dunia internasional, dimana negara sebagai aktor utama. Menurut Robert Jackson & Georg Sorenson dalam buku "Pengantar Studi Hubungan Internasional", mengemukakan bahwa:

> "Alasan utama mengapa kita harus mempelajari hubungan interasional adalah adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi kedalam wilayah komunitas politik yang terpisah, atau negaranegara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama-sama negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang akhirnya menjadi sistem global" (Jackson & Sorenson, 2005: 3).

Suatu interaksi dilakukan karena adanya saling membutuhkan diantara negara-negara tersebut. Melalui interaksi ini, akan terjalin suatu pola hubungan yaitu hubungan internasional. Pola hubungan atau interaksi tersebut dapat berupa kerjasama, persaingan dan pertentangan. Tentunya dalam berlangsungnya hubungan internasional yang diharapkan adalah berlangsungnya pola-pola kerjasama. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdepedensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar.

Hubungan internasional pada masa lampau berfokus pada kajian mengenai perang dan damai serta kemudian meluas untuk mempelajari perkembangan, perubahan dan kesinambungan yang berlangsung dalam hubungan antar negara

atau antar bangsa dalam konteks sistem global tetapi masih bertitik berat kepada hubungan politik yang lazim disebut "*high politics*".

Hubungan internasional yang pada dasarnya merupakan studi mengenai interaksi lintas batas negara oleh *state actor* maupun *non-state actor* memiliki berbagai macam pengertian. Dalam buku "*Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*" Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani. menyatakan bahwa:

> "Studi tentang hubungan internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar" (Perwita & Yani, 2005 : 3-4).

Pada dasarnya, hubungan Internasional mengacu pada seluruh bentuk interaksi hubungan antar negara. Hubungan yang terjadi di antara negara-negara tersebut dapat merupakan suatu hubungan kerjasama atau merupakan hubungan yang ditandai dengan konflik atau persaingan. Setiap negara akan melakukan interaksi dengan negara lainnya dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya dan mencapai suatu kepentingan bersama. Interaksi yang terjadi antar negara tersebut didasari oleh adanya keterbatasan dari tiap negara dalam upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan nasional mereka.

Interaksi dalam hubungan internasional dilakukan oleh para aktor yang didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terorganisasi yang dapat memilih tujuan, memobilisasi sarana untuk mencapai tujuan dan implementasi, secara

umum ada tiga aktor yaitu organisasi internasional, aktor internasional, dan negara-negara.

> "Studi tentang hubungan internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar“ (Perwita & Yani, 2005 : 3-4).

Negara merupakan unit hubungan antar bangsa sekaligus sebagai aktor dalam masyarakat antar bangsa. Negara sebagai suatu organisasi diciptakan dan disiapkan untuk mencapai tujuan tertentu melalui berbagai tindakan yang direncanakan. Sebagai aktor terpenting di dalam hubungan internasional, negara mempunyai tanggung jawab untuk mengupayakan jalan keluar atas segala permasalahan yang menimpa negaranya karena negara mempunyai peran utama didalam memenuhi kebutuhan rakyatnya dan meminimalisasi masalah yang ada dengan tujuan kesejahteraan rakyat. Namun pada kenyataannya, negara sebagai aktor terpenting tidak selalu dapat memenuhiu kebutuhannya sendiri karena keterbatasan sumber daya yang dilimikinya (*insuffiency*). Negara bukanlah satu-satunya aktor penting dalam hubungan internasional, melainkan ada aktor-aktor non-negara lainnya seperti organisasi internasional, MNC’s, LSM, dan interaksinya pun bukan antar negara saja.

2.1.2 *Non-Traditional Security*

Isu-isu keamanan non-tradisional mulai mengemuka pada akhir dekade 1990-an. Ketika sekelompok pakar yang dikenal dengan sebutan *The Copenhagen School* seperti Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde mencoba

memasukkan aspek-aspek diluar hirauan tradisional kajian keamanan. Kajian tersebut misalnya masalah kerawanan pangan, kemiskinan, kesehatan, lingkungan hidup, perdagangan manusia, terorisme, bencana alam sebagai bagian dari studi keamanan.

Dengan memasukkan hal-hal tersebut kedalam lingkup kajian keamanan, maka *The Copenhagen School* mencoba memperluas obyek rujukan isu keamanan dengan tidak lagi selalu berbicara mengenai keamanan negara, tetapi juga menyangkut keamanan manusia. Pandangan ini mengemuka sejak berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan penurunan ancaman militer terhadap kedaulatan suatu negara, tetapi pada saat yang sama adanya peningkatan ancaman terhadap eksistensi manusia pada aspek-aspek lain, seperti kemiskinan, penyakit menular, bencana alam, kerusakan lingkungan hidup, terorisme dan sebagainya.

Kepedulian terhadap keamanan manusia (*human security*) semakin meningkat, terutama setelah laporan tahunan *Human Development Report* pada tahun 1994, dari *United Nations Development Program* (*UNDP*). *UNDP* menetapkan 7 dimensi untuk dijadikan pertimbangan menciptakan "Keamanan Manusia" yang mencakup:

1. Keamanan Ekonomi
2. Keamanan Pangan
3. Keamanan Kesehatan
4. Keamanan Lingkungan
5. Keamanan Individu
6. Keamanan Komunitas

7. Keamanan Politik

Namun demikian, terlepas dari makin besarnya keinginan untuk memasukkan konsep keamanan manusia sebagai agenda kebijakan, hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai bagaimana keamanan manusia itu harus dipahami dan bagaimana pula aplikasi konsep tersebut didalam politik praktis (Buzan, 2009: 183).

2.1.3 Isu kesehatana dalam Dinamika Hubungan Internasional

Dinamika Hubungan Internasional pada satu dasawarsa terakhir ini menunjukkan berbagai kecenderungan baru yang secara substansial sangat berbeda dengan masa-masa sebelumnya, seperti berakhirnya Perang Dingin, mengemukanya isu-isu baru yang secara signifikan telah mengubah wajah dunia. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam Hubungan Internasional meliputi lima bagian utama, yaitu aktor sebagai pelaku Hubungan Internasional, tujuan para aktor, *power*, hirarki interaksi dan sistem internasional itu sendiri.

Perubahan pada aktor diindikasikan dengan perubahan (bertambah dan berkurangnya) jumlah dan sifat aktor Hubungan Internasional. Disamping terjadi penambahan aktor (negara), terjadi pula penambahan secara signifikan pada jumlah aktor non-negara, seperti MNC, IGO, dan INGO.

Pada tahun 1909, hanya tercatat 37 IGO dan 176 INGO. Pada dekade 1960 jumlah IGO meningkat menjadi 154 dan INGO menjadi 1.255. sementara diawal tahun 2003, jumlah aktor non-negara ini mengalami peningkatan menjadi 243 IGO dan 28.775 INGO. Dari angka-angka tersebut terjadi peningkatan yang

sangat tajam dari sisi kuantitas dan dalam beberapa kasus tertentu, peran aktor non-negara ini jauh lebih penting ketimbang aktor negara.

Di sisi lain, interaksi yang dihasilkan IGO dan INGO juga semakin rumit karena keterkaitan mereka dalam beragam isu yang begitu luas, seperti isu kesehatan dan salah satu isu kesehatan yang kini menjadi isu global adalah HIV/AIDS (Perwita dan Yani, 2005:11).

Epidemi HIV/AIDS di Afrika Selatan merupakan ilustrasi rendahnya penyediaan dan perlindungan terhadap keamanan manusia (*human security*) di Afrika Selatan. Konsep keamanan manusia, pada dasarnya merupakan pengembangan konsep keamanan yang selama ini dipahami dalam Hubungan Internasional. Secara etimologis konsep keamanan (*security*) berasal dari kata Latin *securus* (*se* + *cura*) yang bermakna terbebas dari bahaya, terbebas dari ketakutan (*free from danger, free from fear*). Kata ini juga bisa bermaksa dari gabungan kata *se* (yang berarti tanpa/*without*) dan *curus* (yang berarti *uneasiness*). Dengan demikian, bila digabungkan kata ini bermakna *liberation from uneasiness, or a peaceful situation without any risks or threaths* (http: //www/Litbang.Depkes.go.id diakses pada 15 Maret 2017).

Selama ini konsep keamanan diyakini sebagai sebuah kondisi yang terbebas dari ancaman militer atau kemampuan suatu negara untuk melindungi negara dan bangsa dari serangan militer eksternal. Namun, sejalan perkembangan-perkembangan yang begitu cepat dalam Hubungan Internasional, pemahaman konsep keamanan diperluas menjadi tidak hanya meliputi aspek militer dan aktor

negara semata, tetapi mencakup aspek-aspek non-militer dan melibatkan aktivitas aktor non-negara.

Perluasan pemahaman konsep keamanan ini akan mencakup lima dimensi utama. Dimensi pertama yang perlu diketahui dari konsep keamanan adalah *the origin of the threats*. Bila pada masa Perang Dingin ancaman-ancaman yang dihadapi selalu dianggap datang dari pihak luar/eksternal sebuah negara, maka pada masa kini ancaman-ancaman dapat berasal dari lingkungan domestik. Dalam hal ini, ancaman yang berasal dari dalam negeri biasanya terkait isu-isu primordial dan isu keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi domestik, termasuk terbatasnya kemampuan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar pangan.

Dimensi kedua adalah *the nature of threats*. Secara tradisional, dimensi ini menyoroti ancaman yang bersifat militer, namun berbagai perkembangan nasional dan internasional terkini telah mengubah sifat ancaman menjadi jauh lebih rumit. Dengan demikiran, persoalan keamanan menjadi komprehensif karena menyangkut aspek-aspek lain seperti ekonomi, sosial-budaya, lingkungan hidup, bahkan isu-isu kesehatan masyarakat. Mengemukanya berbagai aspek itu sebagai sifat-sifat baru ancaman yang berkorelasi kuat dengan dimensi ketiga yakni *changing response*. Bila selama ini respon yang muncul adalah hanya tindakan kekerasan/militer, isu-isu itu kini perlu diatasi dengan pendekatan non-militer. Dengan kata lain, pendekatan keamanan yang bersifat militeristik sepatutnya digeser oleh pendekatan-pendekatan non-militer seperti ekonomi, politik, hukum, dan sosial-budaya.

Dimensi berikut yang akan mengarahkan kita pada perlunya perluasan penekanan keamanan non-tradisional adalah *changing responsibility of security*. Bagi para pengusung konsep keamanan tradisional, negara adalah "organisasi politik" terpenting yang berkewajiban menyediakan keamanan bagi seluruh warganya. Sementara itu, para penganut konsep keamanan manusia menyatakan, tingkat keamanan yang begitu tinggi akan amat bergantung pada seluruh interaksi individu baik pada tataran lokal, nasional, regional, maupun global. Hal ini dikarenakan keamanan manusia merupakan agenda pokok semua manusia di dunia. Karena itu dibutuhkan kerjasama erat antar semua individu. Dengan kata lain tercapainya keamanan tidak hanya bergantung pada negara, tetapi akan ditentukan oleh kerjasama transnasional antara aktor negara dan non-negara.

Dimensi terakhir adalah *core values of security*. Berbeda dengan kaum tradisional yang memfokuskan keamanan pada kemerdekaan nasional, kedaulataan, dan integritas teritorial, kaum non-tradisional melihat mengemukanya nilai-nilai baru dalam tataran individual maupun global yang perlu dilindungi. Nilai-nilai tersebut antara lain penghormatan pada HAM, demokratisasi, perlindungan terhadap kesehatan manusia, lingkungan hidup, dan memerangi kejahatan lintas batas (*transnational crime*) perdagangan narkotika, *money laundering* ,dan terorisme.

Dalam konteks ini, makna keamanan manusia terdiri dari tujuh dimensi yang saling terkait, yaitu keamanan ekonomi (terbebas dari kemiskinan), keamanan pangan (ada akses untuk pangan), keamanan kesehatan (tersedianya akses terhadap pelayanan kesehatan dan perlindungan dari penyakit menular),

keamanan lingkungan (perlindungan dari bahaya kerusakan lingkungan), keamanan individu (keselamatan fisik dari kekerasan domestik, kriminalitas, bahkan dari kecelakaan lalu lintas), keamanan komunitas (terjaminnya nilai-nilai budaya) dan keamanan politik (terjaminnya HAM). Tidak meratanya ekonomi di Afrika Selatan membuat keamanan ekonomi beberapa masyarakat berakibat pada rendahnya kesehatan masyarakat seperti yang terjadi belakangan ini. Ketidak tahuan dalam keamanan sosial-budaya berdampak pada epidemi HIV/AIDS. Dengan demikian, keamanan manusia dapat dipahami sebagai kemampuan untuk mengatasi berbagai ancaman seperti penyakit, malnutrisi, kriminalitas, konflik sosial, represi politik, dan degradasi lingkungan hidup.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, konsep, isu, maupun agenda keamanan patut dijawab secara multidemensional. Pemahaman menyeluruh terhadap konsep keamanan manusia dan alernatif penyelesaian berbagai masalah keamanan tidak cukup hanya dengan menggunakan pendekatan militer, tetapi perlu mengintegrasikan berbagai pendekatan lain dan melibatkan seluruh komponen, baik lokal, nasional, maupun internasional.

Dengan demikian dalam kondisi kekinian, ada empat elemen penting yang harus diperhatikan dari konsep keamanan manusia. *Pertama*, keamanan manusia tak lagi hanya didominasi komponen militer. *Kedua*, keamanan manusia merupakan produk kebijakan yang dihasilkan beragam aktor (negara maupun non-negara). *Ketiga*, keamanan manusia mensyaratkan interaksi yang bersifat interdependen yang dihasilkan baik dari tataran lokal, nasional, regional, maupun global (Perwita dan Yani. 2005:123-126).

2.1.4 Organisasi Internasional

Organisasi Internasional merupakan pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung dan melaksanakan fungsi-fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda (Rudy, 2005 : 3).

Organisasi internasional merupakan salah satu aktor politik internasional. Organisasi internasional diperlukan dalam rangka kerjasama, menyesuaikan dan mencari kompromi untuk meningkatkan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama, serta mengurangi pertikaian yang timbul. Organisasi juga diperlukan dalam menjajagi sikap bersama dan mengadakan hubungan dengan negara lain. Ciri organisasi internasional yang mencolok ialah merupakan suatu organisasi yang permanen untuk melanjutkan fungsinya yang telah ditetapkan. Organisasi itu mempunyai instrumen dasar (*constituent instrument*) yang akan memuat prinsip-prinsip dan tujuan, struktur maupun cara organisasi itu bekerja.

Sepak terjang organisasi internasional dalam interaksi Hubungan Internasional telah mengantarnya menjadi salah satu aktor yang cukup berpengaruh dalam dialektika interaksi antar-aktor Hubungan Internasional. Lain halnya dengan aktor negara yang pasti memiliki politik luar negeri yang kemudian menjadi kepentingan nasional sebuah negara untuk selalu dipegang dalam setiap proses interaksi internasional, organisasi internasional tidak memiliki politik luar

negeri. Namun, organisasi internasional bisa menjadi instrumen bagi pelaksanaan kebijakan luar negeri negara-negara anggotanya.

Tipologi Organisasi Internasional dapat dimengerti melalui tiga bentuk pengklasifikasian, yaitu:

1. Keanggotaan

   Suatu organisasi harus terdiri dari dua atau lebih negara berdaulat, yang sekalipun keanggotaanya tetap tidak tertutup bagi perwakilan suatunegara, misalnya menteri-menteri dalam pemerintahan suatu negara.

2. Tujuan

   Suatu organisasi didirikan dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama anggota-anggotanya, tanpa adanya upaya untuk mengabaikan kepentingan anggota lainnya.

3. Struktur

   Suatu organisasi harus memiliki struktur formal sendiri yang biasanya terwujud dalam perjanjian, misalnya seperti konstitusi. Struktur formal suatu organisasi haruslah terlepas dari kendali salah satu anggota, dalam arti suatu Organisasi Internasional harus bersifat otonomi (Archer,2001:34-35).

Berdasarkan aktivitasnya, Organisasi Internasional dapat juga diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Organisasi Internasional yang melakukan aktivitas politik tingkat tinggi (*High Politics*). Dalam aktivitas politik tingkat tinggi termasuk di dalamnya bidang diplomatik dan militer yang dihubungkan dengan keamanan dan kedaulatan.

2. Organisasi Internasional yang memiliki aktivitas politik tingkat rendah (*Low Politics*). Dalam aktivitas politik tingkat rendah adalah aktivitas dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Selain mempunyai tujuan yang harus dipenuhi, setiap Organisasi Internasional harus mempunyai struktur formal tersendiri yang ditetapkan didalam sebuah perjanjian. Bentuk struktur formal dari masing-masing Organisasi Internasional berbeda antara satu dengan yang lainnya (Archer, 2001:36).

Struktur formal organisasi mempunyai fungsi-fungsi tertentu dan diimplementasikan menjadi peran yang berbeda-beda. Agar fungsi dari Organisasi Internasional dapat berjalan dengan baik, maka tiap Organisasi Internasional perlu menjalankan peranannya masing-masing di dalam Hubungan Internasional.

Fungsi dari Organisasi Internasional adalah sebagai berikut:

1. *National Interest articulation and aggregation*.

   Organisasi juga menjalankan mekanisme alokasi nilai-nilai dan sumber-sumber daya yang dimiliki yang lebih banyak disandarkan pada perjanjian-perjanjian yang dihasilkan melalui perundingan oleh masing-masing negara anggota. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa organisasi internasional berfungsi sebagai instrumen bagi negara untuk mengartikulasikan kepentingannya sendiri.

2. *Norms*

   Terdiri dari norma-norma seperti: penetapan, nilai-nilai, atau prinsip-prinsip non-diskriminasi, perdagangan bebas, mendelegitimasikan kolonialisme barat, mendorong pelucutan dan pengendalian senjata, dan lain-lain.

3. *Recruitment*

   Merekrut partisipan baru ke dalam sistem internasional dengan menyatukan kelompok dan individu untuk tujuan yang sama, mendukung pemerintah, mempromosikan aktivitas perdagangan, menyebarkan kepentingan komersial atau kepercayaan religius.

4. Sosialisasi

   Bertujuan untuk menanamkan kesetiaan seseorang dalam sistem, dimana dia tinggal atau untuk memperoleh penerimaan dari sistem itu dan institusinya.

5. Pembuatan Keputusan

   Kebanyakan organisasi internasional mendasarkan pembuatan keputusan mereka seperti :

   1) Pembuatan keputusan diformulasikan berdasarkan suara bulat atau mendekati dari konsensus anggota.
   2) Para anggota mempunyai pilihan praktis untuk keluar dari organisasi dan mengakhiri persetujuan mereka terhadap peraturan.
   3) Walaupun dibatasi keanggotaan negara dapat menyatakan hak untuk mengartikan peraturan unilateral yang diijinkan.
   4) Struktur birokratik eksekutif dari organisasi sedikit atau tidak memiliki kekuasaan untuk memformulasikan peraturan.
   5) Delegasi organisasi bahan pembuatan keputusan diatur oleh pemerintah mereka dan tidak bertindak sebagai perwakilan bebas.
   6) Organisasi internasional tidak memiliki hubungan langsung dengan penduduk negara kota.

6. Penerapan Keputusan

   Dalam sistem politik dalam negeri penerapan keputusan dijalankan oleh sebagian besar agensi pemerintah dan dalamekstrimis oleh politisi, militer dan pasukan bersenjata. Dalam sistem politik internasional, penerapan keputusan ditinggalkan sebagian besar negara yang berkuasa karena tidak ada kewenangan dunia pusat dengan agen-agen untuk menjalankan bagian itu.

7. Pengawasan Keputusan

   Dibawa oleh kehakiman-kehakiman hukum, panel arbitrasi, pengadilan dan sebagainya. Tujuan utamanya untukmemperjelas keberadaan hukum dan institusi pengadilan yang tidak dilibatkan dalam proses politik pembuatan keputusan.

8. Informasi

   Melalui peranan organisasi internasional sebagai forum dimana para anggota dapat saling bertemu dan bertukar pendapat dan para aktor memperkenalkan ide mereka mengenai informasi.

9. Pelaksanaan

   Dapat berupa *banking*, pelayanan bantuan, pelayanan pengungsi, berkaitan dengan komoditi, dan menjalankan pelayanan teknis (Archer, 2001: 154-168).

Menurut Clive Archer dalam bukunya yang berjudul *International Organization*, klasifikasi organisasi internasional berdasarkan keanggotaannya terbagi manjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. *Type of membership* (tipe keanggotaan)

a. *International Governmental Organizations* (*IGO*), yaitu organisasi internasional dengan wakil pemerintahan-pemerintahan sebagai anggota.
b. *International Non-Governmental Organizations* (*INGO*), yaitu organisasi internasional dimana anggotanya bukan mewakili pemerintahan.

2. *Extent of membership* (jangkauan keanggotaan)
   a. Keanggotaan yang terbatas dalam wilayah tertentu.
   b. Keanggotaan yang mencakup seluruh wilayah di dunia (Archer, 2001 :66).

2.1.4.1 *International Governmental Organizations* (*IGO*)

International Governmental Organizations (*IGO*) adalah organisasi yang didirikan beberapa negara untuk mencapai tujuan bersama. Ciri-ciri *IGO* adalah dibentuk oleh dua negara atau lebih, bersidang secara teratur, mempunyai sifat yang tetap dan keanggotaannya sukarela. Couloumbis dan *Wolfe* mengemukakan klasifikasi organisasi internasional dengan mengkombinasikan antara keanggotaan dan tujuan. Kedua tokoh Hubungan Internasional tersebut mengemukakan bahwa *IGO* dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori berdasarkan keanggotaan dan tujuan, yaitu:

1. Organisasi yang keanggotaannya dan tujuannya umum (*general membership and general purpose*). Misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Organisasi ini mempunyai ruang lingkup global dan melakukan berbagai fungsi seperti keamanan, kerjasama ekonomi, sosial dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Organisasi yang keanggotaannya umum dengan tujuan terbatas (*general membership and limited purpose*) yang juga dikenal sebagai organisasi

fungsional karena bergerak dalam suatu bidang yang spesifik. Misalnya *World Health Organization* (*WHO*), *United Nations Programme on AIDS* (UNAIDS), *United Nations Development Program* (*UNDP*), dan lain-lain.

3. Organisasi yang keanggotaannya terbatas dengan tujuan umum (*limited membership and general purpose*). Organisasi ini merupakan organisasi regional yang memiliki fungsi dan tanggung jawab keamanan. Misalnya *Association of South East Asian Nations* (*ASEAN*), Liga Arab, dan lain-lain.

Organisasi yang keanggotaannya terbatas dan dengan tujuan yang terbatas juga (*limited membership and limited purpose*). Organisasi ini dibagi atas organisasi sosial, ekonomi, militer, pertahanan, dan lain-lain. Misalnya *North Atlantic Treaty Organization* (*NATO*), *North American Free Trade Agreement* (*NAFTA*), dan lain-lain (Couloumbis dan Wolf, *1999 :* 252).

2.1.5 Paradigma Pluralis (*Pluralism*)

Pluralis merupakan salah satu perspektif yang berkembang pesat. Kaum pluralis memandang hubungan internasional tidak hanya terbatas pada hubungan antar negara saja, tetapi juga merupakan hubungan antar individu dan kelompok kepentingan dimana negara tidak selalu sebagai aktor utama dan aktor tunggal.

Empat asumsi paradigma pluralis, yaitu:

1. Aktor-aktor non-negara adalah entitas penting dalam hubungan internasional yang tidak dapat diabaikan, contohnya Organisasi internasional baik yang pemerintahan maupun non-pemerintahan, aktor transnasional, kelompok-kelompok bahkan individu.

2. Negara bukanlah aktor *unitarian*, melainkan ada aktor-aktor lainnya yaitu individu-individu, kelompok kepentingan dan para birokrat.
3. Menentang asumsi realis yang menyatakan negara sebagai aktor rasional, dimana pluralis menganggap pengambilan keputusan oleh suatu negara tidak selalu didasarkan pada pertimbangan yang rasional, akan tetapi demi kepentingan-kepentingan tertentu.
4. Agenda dalam Politik Internasional adalah luas, pluralis menolak bahwa ide Politik Internasional sering didominasi dengan masalah militer. Agenda Politik Luar Negeri saat ini sudah berkembang dan militer bukanlah satu-satunya hal yang paling utama, tetapi ada hal-hal utama lain didalam hubungan internasional seperti ekonomi dan sosial (Viotti dan Kauppi, 1990:195).

Kenyataan bahwa negara bukanlah satu-satunya aktor dalam hubungan internasional akan menimbulkan adanya interaksi dan saling ketergantungan. Saling ketergantungan tersebut lambat laun akan melahirkan kerjasama internasional yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat didalamnya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Epidemi HIV/AIDS yang ada di Afrika Selatan membuat penduduk terinfeksi HIV/AIDS terbanyak di dunia. Dalam mengatasi penyebaran HIV/AIDS tidak dapat ditangani oleh negara Afrika Selatan saja. Maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan *World Health Organizations* (WHO)

membuat program bersama yang melahirkan *United Nation Programme on AIDS* (UNAIDS) yang dikhususkan untuk mengatasi HIV/AIDS di seluruh dunia termasuk ke Afrika Selatan. Masuknya UNAIDS ke Afrika Selatan telah menunjukkan adanya interaksi antara aktor yang melewati batas suatu negara. Demikian telah kita ketahui sebelumnya bahwa terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan diantara aktor-aktor tersebut.

Pada studi kasus yang diangkat pada penelitian ini bisa dilihat dari negara Afrika Selatan yang memang sangat memerlukan bantuandari sebuah Organisasi kesehatan dunia yang berfokus pada HIV/AIDS yaitu *United Nations Programme on AIDS* (UNAIDS). UNAIDS adalah organisasi internasional tentang masalah kesehatan terlebih HIV/AIDS, tentu saja UNAIDS sangat berperan dalam menangani penyebaran epidemi HIV/AIDS tersebut.

Untuk menangani epidemi HIV/AIDS di Afrika Selatan, dengan ini UNAIDS mengemukakan sebuah pelaksanaan untuk mengatasi HIV/AIDS dinegara tersebut yaitu *Getting to Zero*. Terdapat 3 strategi utama didalam pelaksanaan *Getting to Zero* tersebut, yaitu *revolutionize HIV prevention, catalyze the next phase of treatment, care and support*, dan yang terakhir yaitu *advice a human rights and gender quality for HIV response*.

Isu keamanan saat ini tidak hanya berbicara mengenai isu *high politics* saja, isu keamanan non-tradisional mulai mengemuka pada akhir dekade 1990-an. Kajian tersebut misalnya masalah kesehatan. Maka dari itu Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) dan *World Health Organizations* (WHO) membuat suatu program yang menghasilkan sebuah struktur organisasi yaitu UNAIDS.

Mengenai konsep Hubungan Internasional, organisasi internasional, isu kesehatan dapat dijabarkan dan diulas secara multidimensional. Pemahaman menyeluruh terhadap isu kesehatan dalam dinamika Hubungan Internasional bahwa penyelesaian masalah isu kesehatan tersebut bisa dilakukan dengan cara non-militer dengan melakukan pendekatan yang dapat melibatkan seluruh komponen, baik lokal, nasional, maupun internasional.

UNAIDS merupakan salah satu aktor politik internasional yang dibutuhkan oleh dunia saat ini. Mengingat banyaknya manusia yang terinfeksi HIV/AIDS dibelahan dunia. UNAIDS adalah organisasi internasional dibidang kemanusiaan khususnya untuk mengatasi HIV/AIDS yang mempunyai tujuan-tujuan yang disepakati bersama oleh pemerintah.

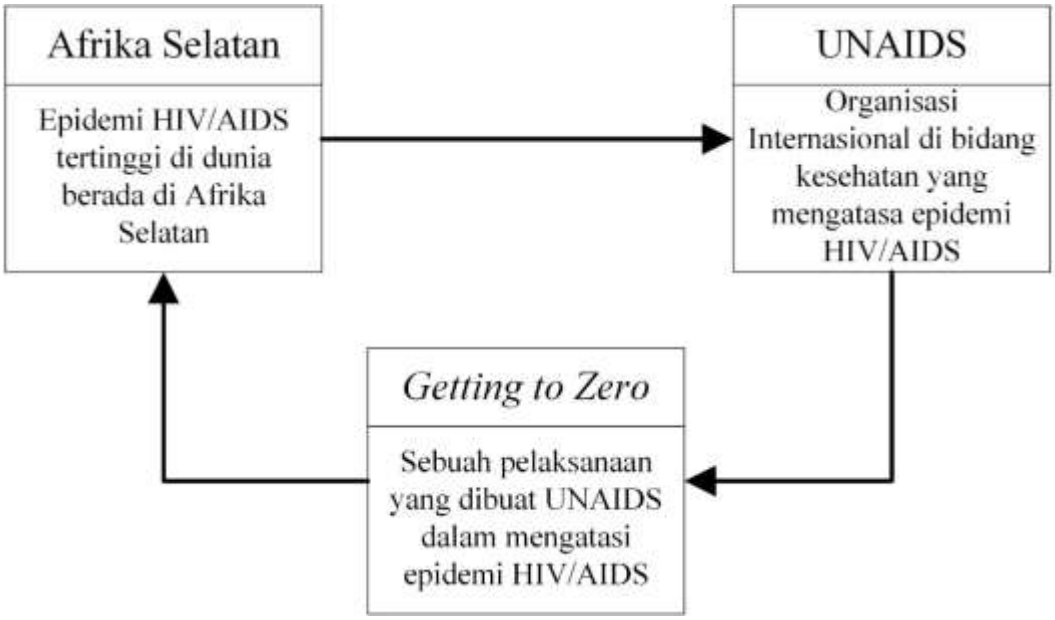
Dalam menangani penyebaran epidemi HIV, UNAIDS memiliki tim terbaik seperti dokter dan perawat serta memberikan bantuan berupa fasilitas kesehatan di Afrika Selatan. UNAIDS melalui *Getting to Zero* mempunyai tujuan dan fungsi khusus yakni memberikan perawatan *antiretroviral*, pengobatan terhadap ibu hamil ke anak, distribusi kondom, memberikan penyuluhan juga kampanye, serta bantuan-bantuan kesehatan lainnya melalui pelaksanaan *Getting to Zero* yang bersifat internasional dengan struktur organisasi yang jelas serta mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan aktor-aktor lainnya.

Berdasarkan konsep klasifikasi Clive Archer bahwa UNAIDS siartikan sebagai pelaku peranan, dalam hal ini UNAIDS digolongkan menjadi

International Governmental Organizations (IGO) yang kemudian didalamnya terdapat mekanisme kerja tersendiri yang dijalankan untuk memenuhi tugas dan fungsinya yaitu organisasi yang keanggotaannya umum dengan tujuannya terbatas yang juga dikenal sebagai organisasi fungsional karena bergerak dalam suatu bidang yang spesifik khususnya dibidang kesehatan.

Melihat dari keanggotaan dan tujuan yang dimiliki oleh UNAIDS, maha UNAIDS termasuk kedalam IGO dan keanggotannya umum dengan tujuan yang terbatas (*general membership and limited purpose*). Dikenal juga sebagai organisasi fungsional karena bergerak dalam bidang yang spesifik, yaitu mengenai kesehatan khususnya HIV/AIDS yang berdampak global serta pemberian bantuan di bidang kesehatan lainnya melalui program-program yang dibuat, serta pembangunan fasilitas kesehatan, sara prasarana, pengobatan, dan penelitian dalam bidang kesehatan.

Oleh karena itu Afrika Selatan sangat terbantu dengan masuknya UNAIDS ke negara tersebut. Saling ketergantungan lambat laun akan melahirkan kerjasama internasional yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat didalamnya.



Sumber : Peneliti 2017

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran